



KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI

Herni Djohanis¹, Istiqamah Bungana²

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : hdjohanis@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemungkinan besar adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif dinas tersebut dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM di wilayah itu, sehingga dapat diketahui strategi atau program apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diberbentuk informasi yang di dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan tentang Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Jumlah informan 8 orang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitanya penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil Penelitian adalah Dinas Koperasi telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku UMKM dengan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, membantu pemasaran melalui pameran dan bazar, serta memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis. Pelayanan ini juga meliputi penyediaan akses permodalan melalui program seperti KUR dan UMi, serta fasilitasi sertifikasi produk. Kinerja Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM telah memenuhi target melalui berbagai program dan fasilitasi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan akses pasar, pembangunan jaringan, serta kemudahan berusaha. Beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan persentase koperasi yang sehat dan pencapaian target lainnya yang ditetapkan.

Kata kunci: Kinerja ; Dinas Koperasi ; UMKM

Abstract

The purpose of the research on the performance of the Cooperative and MSMEs Office in Luwuk District, Banggai Regency, is most likely to evaluate how effective the office is in empowering and developing MSMEs in the region, so that it can be known what strategies or programs need to be improved to create jobs, improve community welfare, and encourage sustainable local economic growth. The type of research used in this study is descriptive qualitative, namely data in the form of information obtained in oral and written forms, in this case the researcher focuses more on the Performance of the Cooperative and MSMEs Office in Luwuk District, Banggai Regency. The number of

informants is 8 people. To obtain the data needed in relation to this research, the author uses 2 types of data, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from respondents and secondary data is data derived from documents or references related to the research object. The results of the study are that the Cooperative Office has provided good services to MSME actors by acting as a facilitator who provides training facilities and infrastructure, helps marketing through exhibitions and bazaars, and provides business assistance and consultation. These services also include providing access to capital through programs such as the People's Business Credit (KUR) and the Micro, Small, and Medium Enterprises (UMi), as well as facilitating product certification. The Cooperatives Office's performance in developing MSMEs has met targets through various programs and facilities, such as skills training, market access assistance, network development, and ease of doing business. Several indicators of success can be seen in the increasing percentage of healthy cooperatives and the achievement of other established targets.

Keywords: Performance; Cooperatives Office; UMKM

Pendahuluan

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Kinerja menjelaskan capaian pelaksanaan tugas oleh seluruh komponen yang ada dalam sebuah organisasi maupun instansi pemerintah (Tsauri, 2014).

Undang-undang dasar yang menjadi acuan utama untuk dinas koperasi di Indonesia Adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain UU Perkoperasian, dasar hukum lain yang mendukung dinas koperasi mencakup berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi (misalnya PP Nomor 7 Tahun 2021) serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (misalnya Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018).

Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banggai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah dengan memaksimalkan potensi lokal, dan mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Upaya ini merujuk Pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mencakup peningkatan akses permodalan, penguatan manajemen, adopsi teknologi, dan promosi produk lokal melalui berbagai program inovatif. Sementara kesesuaian tahapan penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi cerminan akuntabilitas (Tamami, 2020).

Namun keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data awal yang peneliti apatkan dari Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Banggai, permasalahan UKM berkaitan dengan kurangnya sumberdaya pegawai dinas, permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Kinerja organisasi juga dapat diukur dengan indikator efisiensi yang mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin (Moeheriono, 2018).

Para UMKM akan mendapatkan pendampingan untuk memanfaatkan teknologi dalam berbisnis untuk mencapai pasar (Nurranirusmana, 2022). Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UKM. Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu dinas Koperasi dan UKM yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat. Selain permasalahan teknis juga dikarenakan UKM ini masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya. Berkembangnya tingkat perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran serta suatu badan usaha. Badan usaha yang tidak sehat atau bekerja kurang baik, kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan (Sutinah dan Sahuri, 2016). Beberapa persoalan yang di hadapi UKM sehingga sulit berkembang antara lain:

1. Ketidakmampuan dalam manajemen;
2. Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;
3. Kurang berpengalaman;
4. Lemahnya pengawasan keuangan;
5. Kurangnya penyuluhan kepada para pelaku UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan pertahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. UMKM turut berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Di sektor kuliner, UMKM sering kali menjadi pionir inovasi makanan, seperti mengembangkan produk tradisional menjadi makanan beku siap saji untuk menjangkau pasar modern tanpa meninggalkan cita rasa lokal. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Banyak pelaku usaha mikro yang memulai dengan modal terbatas dan memanfaatkan dapur rumah sebagai tempat produksi, mencerminkan semangat kewirausahaan dari skala kecil. Inklusi keuangan adalah kemampuan individu untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan dasar seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi yang dirancang dengan cara yang aman, nyaman andal dan fleksibel (Ibor et al., 2017).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan 4 bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 miliar. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Nur, 2017).

Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp50 miliar. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (Amin, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara, suatu badan usaha khususnya UMKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya, hal ini karena banyak dari para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga / rumahan sehingga pengelolaanya tidak dimanajemen dengan baik (Saputri, 2022). Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2024 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diberbentuk informasi yang di dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan tentang Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang di angkat maka peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor dinas Koperasi dan UMKM kabupaten banggai sebagai lokasi penelitian sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini. Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang di angkat (sugiyono, 2010). Jumlah informan 8 orang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitanya penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja dinas koperasi adalah pencapaian tujuan dalam membantu dan mengembangkan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan organisasi dan manajemen hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja dan fasilitasi usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Secara umum, kinerja ini diukur dari pertumbuhan omzet, aset, jumlah anggota, dan pasar yang dilayani.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja merupakan salah satu usaha pemerintah yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru. Dimana Kota Banjarbaru memiliki potensi yang besar untuk tumbuhnya usaha kecil menengah terutama usaha kecilnya. Sektor ini menjadi wadah penyerapan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lain. Pembinaan yang dilakukan oleh bidang Usaha Kecil Menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta mengikutsertakan pelaku usaha tersebut dalam suatu kegiatan pameran. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini diadakan selama sepuluh kali dalam kurun waktu satu tahun dan tergantung pada anggaran dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bersama Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, dapat kita simpulkan bahwa Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Banggai sangat membantu pelaku usaha melalui program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan teknis, serta memberikan bantuan biaya melalui program program seperti KUR, UMi, dan fasilitasi akses pembiayaan lainnya. Dinas juga berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, prasarana, dan akses pasar untuk UMKM.

Manfaat dinas koperasi dalam pelatihan dan bantuan biaya bagi UMKM adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha melalui pelatihan manajemen (produksi, keuangan, pemasaran), membantu legalitas usaha seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memberikan akses pendanaan melalui bantuan biaya atau fasilitasi pinjaman modal. Selain itu, dinas koperasi juga berfungsi sebagai fasilitator untuk memperluas jaringan pemasaran dan akses pasar melalui pameran, bazar, atau sistem e-katalog.

Koperasi”. Pemberian bantuan dan program pelatihan kepada pelaku UMKM bermanfaat untuk meningkatkan modal dan keterampilan, mengembangkan usahanya secara digital, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas. Hal ini secara keseluruhan bertujuan untuk pemberdayaan UMKM agar dapat menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Berikut Beberapa Manfaat bantuan dan program pelatihan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banggai :

- a) Meningkatkan modal dan keterampilan: Bantuan finansial mempermudah akses modal tanpa agunan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mengelola keuangan, serta mengembangkan strategi bisnis yang efektif
- b) Mengembangkan usaha secara digital: Program pelatihan dapat membantu pelaku UMKM dalam transformasi digital seperti membuat website, media sosial, dan memasarkan produk di marketplace sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas.
- c) Memperluas jaringan bisnis: Pelatihan memberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan pelaku UMKM lainnya, yang dapat membuka peluang kerjasama dan memperkuat jaringan bisnis.
- d) Meningkatkan kualitas dan produktivitas: Pelatihan mendorong inovasi dan kreativitas, serta membantu UMKM meningkatkan kualitas produk atau layanan dan produktivitas usaha.
- e) Mendorong pertumbuhan ekonomi: Pemberdayaan UMKM melalui bantuan dan pelatihan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional.

Beberapa manfaat apabila dinas koperasi dalam memberikan pelayanan yang menyangkut program dan kebutuhan masyarakat adalah meningkatkan daya saing dan kualitas hidup ekonomi masyarakat melalui pembinaan, pelatihan, dan akses pasar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pelayanan ini membantu koperasi mencapai visi-misi mereka, seperti memperkuat organisasi dan manajemen, meningkatkan kemampuan wirausaha, dan mencapai kesejahteraan anggota secara kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Kepala Dinas dan Pelaku Usaha dapat kita lihat Manfaat dinas dalam memberikan kebijakan dan proses administrasi yang murah dan mudah adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan

publik, mempermudah akses warga terhadap layanan, dan mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan administrasi yang efisien, dinas dapat menyediakan kebijakan yang lebih baik dan terjangkau, serta proses yang lebih cepat dan tidak membebani masyarakat.

Manfaat kebijakan dan administrasi yang murah dan mudah

1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Administrasi yang disederhanakan dapat meminimalisir biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan seperti administrasi kependudukan, izin, atau layanan lainnya.

2) Mendukung perencanaan pembangunan daerah: Data yang akurat dari administrasi kependudukan dan administrasi lainnya sangat penting untuk dasar penyusunan kebijakan publik terkait perencanaan dan pembangunan wilayah.

3) Mempermudah akses masyarakat: Proses administrasi yang murah dan mudah dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya, jarak, atau birokrasi yang rumit.

4) Mendorong partisipasi publik: Dengan adanya proses yang mudah, masyarakat lebih berpartisipasi dalam memberikan masukan dan mendukung program pemerintah karena merasa lebih dekat dan terlibat.

5) Meminimalkan potensi konflik: Penetapan dan penegasan batas wilayah melalui administrasi yang jelas dapat meminimalisir konflik kewilayahan antar desa atau daerah. 6) Meningkatkan kepercayaan publik: Pelayanan publik yang baik, cepat, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kontribusi pegawai dinas koperasi dalam mencapai target pengembangan UMKM sangat vital karena mereka bertindak sebagai fasilitator (penyedia pelatihan dan sarana), pembimbing (konsultasi dan pendampingan bisnis), serta penghubung (membuka akses pasar dan pembiayaan). Pegawai yang kompeten dalam dinas juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan internal mereka sendiri untuk mendukung UMKM secara lebih efektif. Manfaatnya antara lain meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta memastikan program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan dan harapan UMKM di lapangan.

Berikut beberapa Manfaat kontribusi pegawai dinas koperasi

a) Meningkatkan kualitas UMKM:

- Melalui bimbingan teknis, konsultasi bisnis, dan pendampingan usaha, UMKM dapat terus berinovasi dan berkembang.

- Dengan adanya pelatihan keterampilan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.

b) Memperluas akses pasar dan pembiayaan:

- Pegawai dinas dapat menjadi penghubung antara UMKM dengan lembaga keuangan, sehingga memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah.

- Mereka juga berperan aktif dalam memfasilitasi pemasaran produk UMKM, baik secara konvensional maupun digital.

c) Mendorong pertumbuhan ekonomi:

- Dengan adanya dukungan yang optimal, UMKM yang lebih kuat dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto.

- Pengembangan UMKM yang lebih baik juga dapat menumbuhkan budaya kewirausahaan di masyarakat.

d) Memperkuat manajemen dinas:

- Kontribusi pegawai dalam pengembangan UMKM juga dapat diimbangi dengan peningkatan kompetensi mereka sendiri, melalui pelatihan di bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknologi.

- Koordinasi yang baik antar staf di dinas akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan pencapaian target.

Kinerja dinas koperasi secara umum telah memenuhi target, tetapi ada beberapa area yang belum mencapai target dan membutuhkan perbaikan. Hasilnya bervariasi tergantung pada dinas dan periode waktu yang dievaluasi; misalnya, beberapa dinas melaporkan realisasi yang melebihi target, seperti persentase koperasi simpan pinjam yang sehat, sementara dinas lain fokus pada perbaikan area yang belum mencapai sasaran.

Capaian kinerja umum: Laporan kinerja instansi pemerintah di tingkat pusat menunjukkan bahwa secara umum target capaian kinerja telah terpenuhi sesuai rencana, meskipun ada beberapa sasaran yang perlu diperbaiki untuk periode berikutnya.

- Dukungan anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian target.

- Dukungan sumber daya manusia (SDM): Ketersediaan SDM yang kompeten, khususnya dalam bidang penilaian kesehatan koperasi, juga sangat penting.

- Dukungan data: Data yang valid dan akurat mengenai keberadaan koperasi menjadi faktor penting lainnya untuk mendukung pencapaian target.

- Peningkatan keterampilan tenaga kerja: Menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya dapat meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja.

- Perbaikan dan evaluasi: Terus-menerus mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang belum mencapai target untuk diperbaiki pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat Syarat pengajuan pengembangan UMKM ke Dinas Koperasi meliputi dokumen identitas diri seperti KTP dan NIB, dokumen legalitas usaha seperti Surat Keterangan Usaha (SKU), proposal usaha, laporan keuangan sederhana (jika diminta), serta rekening bank aktif atas nama pemilik usaha. Dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga dan NPWP juga mungkin diperlukan, serta kriteria usaha dan pelaku usaha juga harus terpenuhi.

Dokumen yang diperlukan

a) Identitas:

- Fotokopi KTP pemilik usaha yang masih berlaku.

- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS).

- Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b) Legitimasi Usaha:
 - Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan/RT/RW, terutama jika alamat KTP berbeda dengan lokasi usaha.
 - c) Proposal dan Keuangan:
 - Proposal usaha yang menjelaskan rencana bisnis dan penggunaan dana.
 - Laporan keuangan sederhana (jika diminta).
 - Bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak (jika diperlukan).
 - d) Bank:
 - Rekening bank yang aktif atas nama pemilik usaha untuk pencairan dana.
2. Kriteria tambahan
- a) Status Pemilik: Pemohon harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan merupakan pegawai BUMN, BUMD, PNS, atau anggota TNI/POLRI.
 - b) Informasi Usaha: Informasi mengenai luas lahan usaha, modal usaha, produk dan jasa, serta akses internet juga mungkin diperlukan saat mendaftar.
3. Proses pengajuan
- Siapkan seluruh dokumen persyaratan yang disebutkan di atas.
 - Ajukan permohonan secara online melalui sistem yang ditentukan oleh pemerintah atau datang langsung ke Dinas Koperasi setempat.
 - Lengkapi data dan unggah dokumen pendukung yang diperlukan.
 - Dinas Koperasi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diajukan.
 - Jika pengajuan disetujui, dana bantuan pengembangan UMKM akan dicairkan melalui rekening bank yang terdaftar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dan ditunjang oleh data sekunder, maka dapat disimpulkan:

1. Dinas Koperasi telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku UMKM dengan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, membantu pemasaran melalui pameran dan bazar, serta memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis. Pelayanan ini juga meliputi penyediaan akses permodalan melalui program seperti KUR dan UMi, serta fasilitasi sertifikasi produk.
2. Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan kebijakan yang mempermudah pelaku UMKM melalui berbagai program dukungan. Memberikan akses terhadap bantuan modal usaha melalui program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman Ultra Mikro (UMi), serta memberikan subsidi bunga kredit.
3. Kinerja Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM telah memenuhi target melalui berbagai program dan fasilitasi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan akses pasar, pembangunan jaringan, serta kemudahan berusaha. Beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan persentase koperasi yang sehat dan pencapaian target lainnya yang ditetapkan.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press.
- Moehariono, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Amin, M. M. (2022). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru). *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 6(1), 34-42.
- Ibor, B. I., Offiong, A. I., & Mendie, E. S. (2017). Financial inclusion and performance of micro, small and medium scale enterprises in Nigeria. *International Journal of Research Granthaalayah*, 5(3), 104–122.
- Nur, D. S. (2017). Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 5844.
- Nurranirusmana. (2022). Dinas KUK Jabar Targetkan Cetak 4.000 Pelaku UMKM Juara. Retrieved from Jabarekspres.Com. <https://jabarekspres.com/berita/2022/02/07/dinas-kuk-jabartargetkan-cetak-4-000-pelaku-umkm-juara>
- Sutinah, A., & Sahuri, C. (2016). *Manajemen Kinerja Organisasi Dinas Koperasi dan USAha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Saputri, D. A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk). *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 3(2).
- Tamami, A. . (2020). Kualitas Pelayanan di Sektor Publik Dengan Perspektif NPS. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1).